

### **BAB III**

#### **WAR ON TERRORISM**

Perubahan persepsi AS terkait dengan keamanan nasional yang pada awalnya sumber ancaman berasal dari kekuatan negara super power dan ideologi bergeser menjadi *war on terrorism*. Fenomena terorisme kemudian menjadi perhatian semua aktor politik internasional tidak hanya aktor negara tetapi juga aktor non-negara. Dalam bab tiga penulis akan membahas tentang isu terorisme sebagai ancaman keamanan dari mulai sejarah munculnya isu terorisme, definisi terorisme, gerakan terorisme internasional serta bagaimana kebijakan yang diambil oleh AS yaitu oleh Presiden Bush dan Presiden Obama dalam menanggulangi ancaman terorisme.

#### **A. Terorisme Sebagai Ancaman Keamanan**

Terorisme merupakan kejahatan yang mengganggu keamanan dan kentrentaman suatu negara. Aksi terorisme berdampak dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.<sup>1</sup> Terorisme menjadi ancaman serius bagi keamanan tidak hanya AS akan tetapi semua negara memiliki pandangan yang sama terkait terorisme.

##### **1. Sejarah Munculnya Isu Terorisme**

Terorisme bukanlah sebuah fenomena yang baru. Terorisme telah ada sejak lama dan memiliki sejarah yang panjang dan beragam dengan sebuah

---

<sup>1</sup> Muhammad Taufiq, *Terorisme Demokrasi 2 : Densus & Terorisme Negara*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2016), h.1

ideologi yang dipercaya telah ada lebih dari ribuan tahun yang lalu.<sup>2</sup> Aksi terorisme pada 11 september 2001 bukanlah aksi terorisme pertama, sebelumnya juga sudah pernah ada aksi terorisme jauh sebelum 9/11.

Kata "terorisme" berasal dari Revolusi Perancis dan "Pemerintahan Teror," ketika teror digunakan sebagai instrumen kebijakan negara. Teror digunakan untuk menghilangkan unsur-unsur kontra dalam populasi Perancis dari anarki dan kekalahan militer, dan menekan penimbunan dan pencatutan. Robespierre (1794), pemimpin radikal mengatakan bahwa "*Terror is nothing but justice, prompt, severe and inflexible.*"<sup>3</sup> Pada saat itu, Maximilien Robespierre, untuk menanggulangi ancaman kubu monarkis telah memerintahkan eksekusi massal 17.000 tahanan guna memberikan efek jera kepada lawan-lawan politiknya. Pemerintahan gaya Robespierre ini yang kemudian dikenal dengan "rejim terror".<sup>4</sup>

Dalam *Education Scotland*, disebutkan beberapa gerakan terorisme yang muncul sejak abad ke-15 hingga sekarang, yaitu<sup>5</sup>

a. 1605 - Guy Fawkes.

Guy Fawkes adalah anggota paling terkenal dari kelompok yang berencana untuk meledakkan Gedung Parlemen. Guy Fawkes adalah seorang Katolik pada saat Katolik telah dilarang di Inggris dan ia dan rekan-konspirator

---

<sup>2</sup> Costantinus Fatolon, *Masalah Terorisme Global*, (Yogyakarta:PT Kanisius, 2016), h.59

<sup>3</sup> "*Digital History*", dalam [http://www.digitalhistory.uh.edu/topic\\_display.cfm?tcid=94](http://www.digitalhistory.uh.edu/topic_display.cfm?tcid=94) diakses pada 10 November 2016.

<sup>4</sup> Nanto Sriyanto dan Atikah Nur Alami, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7

<sup>5</sup> "*History of Terrorism*" dalam [http://www.educationscotland.gov.uk/Images/TerrorismThroughTheAgesFactsheet2\\_tcm4-716339.pdf](http://www.educationscotland.gov.uk/Images/TerrorismThroughTheAgesFactsheet2_tcm4-716339.pdf) diakses pada 10 November 2016.

nya ingin menurunkan monarki Protestan. Guy Fawkes dan antek-anteknya yang tertangkap tangan pada 5 November 1605. Setelah menjadi sasaran penyiksaan yang mengerikan mereka dieksekusi atas perintah Raja James.

b. 1770-an - The Boston Tea Party.

Selama abad ke-18 Pemerintah Inggris dan *India Company East* dikendalikan impor dan ekspor teh di semua koloni Inggris, termasuk Amerika. The Tea Party adalah gerakan perlawanan yang berperang melawan *Tea Act*, yang telah disahkan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1773.

c. Pertengahan abad 19 - The Ku Klux Klan.

Ku Klux Klan (KKK atau The Klan) adalah kelompok rahasia yang berbasis di AS dengan sejarah menggunakan kekerasan dan terorisme untuk menyoroti ideologi mereka supremasi kulit putih. Anggota KKK mengadopsi topeng, jubah dan topi kerucut untuk menyembunyikan identitas mereka dan untuk menambah drama serangan mereka. Pada tahun 1865, KKK menyerang dan membunuh orang kulit hitam pada waktu malam hari. Ini termasuk serangkaian pemboman menargetkan rumah orang kulit hitam di tahun 1950-an dan pembunuhan orang-orang yang mendukung gerakan hak-hak sipil di Amerika.

d. 1914 - Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand.

Pada 28 Juni 1914 Franz Ferdinand dari Austria ditembak mati oleh Gavrilo Princip, seorang pembunuh 19 tahun terkait dengan gerakan Black Hand. The Black Hand dibentuk oleh anggota tentara Serbia yang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah 'Serbia Raya', menyatukan semua wilayah Serbia dianeksasi oleh Kekaisaran Austro-Hungaria, menggunakan kekerasan jika perlu.

Pembunuhan itu menyebabkan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut dan memicu rantai peristiwa yang akhirnya memicu Perang Dunia I.

e. 1960 - The Troubles, Irlandia Utara.

Istilah *'The Troubles'* mengacu pada periode konflik antara elemen masyarakat nasionalis dan serikat Irlandia Utara. Kesulitan diterima secara luas telah dimulai pada akhir tahun 1960 dan berakhir dengan Perjanjian Belfast 'Jumat Agung' pada tahun 1998. Titik utama dari konflik adalah status konstitusional Irlandia Utara dengan nasionalis (Katolik) percaya harus menjadi bagian dari Irlandia sedangkan anggota serikat (Protestan) percaya harus menjadi bagian dari Inggris. Konflik terjadi dengan adanya penembakan dari 14 demonstran yang tidak bersenjata oleh tentara Inggris pada *'Bloody Sunday'* pada 30 Januari 1972.

f. 1972 - Serangan Olimpiade Munich.

Selama tahun 1972 Olimpiade di Jerman, anggota kelompok Palestina 'Black September' menyandera atlet Israel dan membunuh 11 atlet untuk menuntut pembebasan 234 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

g. 2001- Black September

Pada 11 September 2001 teroris dari Al-Qaeda membajak empat pesawat penumpang berniat untuk kecelakaan ini menjadi target utama di Amerika Serikat. Para pembajak sengaja menabrakkan dua pesawat ke menara World Trade Centre di New York dan satu pesawat ke gedung Pentagon di Arlington, Virginia menewaskan hampir 3000 jiwa masyarakat AS. Pemimpin Al Qaeda, Osama Bin Laden, mengaku bertanggung jawab atas serangan di tahun 2004.

Penyerangan pada 11 September bukanlah pengalaman pertama Amerika dengan kekerasan teroris. Pada tanggal 24 November 1917, sebuah bom diduga telah ditanam oleh anarkis menewaskan sembilan polisi di Milwaukee, Wisconsin. Pada tanggal 2 Juni 1919, anarkis diduga berangkat serangkaian bom di delapan kota, termasuk Washington, DC, di mana sebuah bom menghancurkan sebagian rumah Jaksa Agung A. Mitchell Palmer. Pada tanggal 16 September 1920, sebuah kereta sarat bahan peledak meledak di Wall Street, di seberang markas J.P. Morgan & Company, menewaskan 40 orang dan melukai 300 orang. Pemboman tahun 1886 di Haymarket Square Chicago selama reli tenaga kerja, pada tahun 1910 di Times Building Los Angeles selama perselisihan perburuhan, dan pada tahun 1963 di Birmingham, Gereja Baptis 16th Street Alabama adalah hanya beberapa sebelumnya contoh kekerasan tanpa pandang bulu.<sup>6</sup>

## **2. Konvensi Internasional yang Mengatur Tentang Terorisme**

Kajian isu terorisme telah dibahas sejak abad 20 melalui beberapa konvensi internasional. Hal ini dibuktikan dengan konvensi-konvensi internasional yang sejak tahun 1963 membahas tentang isu terorisme.

Konvensi Internasional yang mengatur tentang Terorisme adalah :

- a. Konvensi yang mengatur kejahatan penerbangan terutama yang terdapat unsur-unsur kejahatan tindakan kejahatan penerbangan adalah merupakan tindakan terorisme. Antara lain yaitu :

---

<sup>6</sup> “*Terrorism in Historical Perspective*” dalam [http://www.digitalhistory.uh.edu/topic\\_display.cfm?tcid=94](http://www.digitalhistory.uh.edu/topic_display.cfm?tcid=94) diakses pada 10 November 2016.

- i. Convention on Offences and Certain Other Acts Comitted on Board Aircraft (Tokyo Convention 1963) Konvensi ini membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara.
- ii. The Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Deen Hag Convention 1970) Konvensi ini membahas mengenai tindakan-tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan sipil.
- iii. Convention for the Suppression OF Unlawful Act Agaimst the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention 1971). Konvensi ini membahas mengenai pemberantasan penguasaan pesawat udara secara melawan hukum.
- iv. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970.* (Konvensi Penindasan terhadap Pengambilan Alih yang Tidak Sah atas Pesawat Terbang).
- v. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971. (Konvensi Penindasan Tindakan yang Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil).
- vi. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.* (Konvensi Penindasan Tindakan yang Melawan Hukum dengan Kekerasan di Bandara yang Melayani

Penerbangan Sipil Internasional, tambahan atas Konvensi Penindasan terhadap Tindakan yang Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil).

vii. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation 1988.* (Protocol untuk Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum Di Bandara yang melayani Penerbangan Sipil Internasional).

b. Konvensi yang mengatur tentang penyanderaan dan tindak pidana terhadap orang-orang yang dilindungi secara hukum merupakan aksi terorisme. Antara lain yaitu :

- i. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, 1973.* (Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Tindak Pidana terhadap Orang-Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen-Agen Diplomat).
- ii. *International Convention against the Taking of Hostages, 1979* (Konvensi International memerangi Pengambilan Sandera).

c. Konvensi yang mengatur kejahatan maritim, wilayah kontinental merupakan bagian dari tindakan terorisme. Antara lain :

- i. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988.* (Konvensi Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Navigasi Maritim).

- ii. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of /Fixed Platforms located on the Continental Shelf, 1988.* (Protokol Penindasan terhadap Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Kebijakan yang telah Ditetapkan yang terletak di Wilayah Kontinental).
  
- d. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997. (Konvensi Internasional Pembrantasan Pemboman oleh Teroris)

Konvensi ini mengatur ketentuan tindak pidana dan penanganannya, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

- e. International Convention for The Suppression of The Financing Terrorist, 1999. (Konvensi Internasional Penindasan Dalam Pendanaan Teroris)

Konvensi ini pada awalnya hanya diratifikasi oleh beberapa negara saja. Namun setelah peristiwa 9/11, semua negara anggota PBB dihimbau untuk meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan terhadap Pendanaan pendanaan terorisme terjadi apabila seseorang dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, secara tidak sah dan dengan sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan agar dana tersebut digunakan atau dengan sadar mengetahui bahwa dana tersebut akan digunakan baik



seluruhnya atau sebagian daripadanya, untuk menjalankan suatu tindakan teroris.

- f. Organization of African Unity (OAU) Convention on the Prevention and Combating of Terrorism (1999)

Konvensi negara-negara di kawasan Afrika mendukung adanya pencegahan dan pembrantasan terorisme.

- g. UNSR Resolution 1368 (2001) Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Act, adopted by Security Council at its 4370th meeting (2001)

Upaya untuk memerangi terorisme terutama terorisme abad kedua puluh satu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi berbagai Resolusi penting setelah 9/11, yang menguraikan kebutuhan untuk memerangi momok terorisme dengan demikian, menegaskan kembali hak negara untuk membela diri melawan terorisme.

- h. EU Council Framework Decision on Combating Terrorism (2002).

Terorisme 9/11 sebagai salah satu pelanggaran paling serius dari kebebasan fundamental, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip dan mengikuti rencana aksi disahkan oleh rapat Dewan Eropa yang luar biasa, Framework Decision 2002/475/JHA diadopsi untuk lebih efektif mengatasi terorisme dengan mensyaratkan negara-negara Uni Eropa untuk menyelaraskan undang-undang mereka dan memperkenalkan hukuman minimum mengenai pelanggaran teroris. Keputusan menentukan pelanggaran teroris, serta pelanggaran terkait dengan kelompok teroris

atau pelanggaran terkait dengan kegiatan teroris, dan menetapkan aturan-aturan untuk transposisi di negara-negara Uni Eropa.

### 3. Definisi Terorisme

Secara etimologi, perkataan “*terror*” berasal dari bahasa Latin “*terre*” yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan “*to fright*”, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menakutkan” atau “mengerikan”. Teror sebagai kata benda berarti : *extreme afaer*, ketakutan yang amat sangat *one who excites extreme afaer*, atau seorang yang gelisah dalam ketakutan yang amat sangat. *The ability to cause such afaer*, kemampuan menimbulkan ketakutan. Sedangkan terorisme sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation to gain and end, especially, a system of government rulling by terror*, penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror. *To intimidate or coerce by terror or by threas of terror*, mengancam atau memaksa dengan teror.<sup>7</sup>

Menurut Terrorism Act 2000 (Inggris), terorisme berarti penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Penggunaan kekerasan terhadap seseorang (atau kelompok) dan menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik

---

<sup>7</sup> Mardenis, *Pembrantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), h.85-86

- b. Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu dari publik.
- c. Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi.<sup>8</sup>

AS sebagai negara yang pertama kali mendeklarasikan *war on terrorism*, sangat jelas telah secara tidak konsisten menggunakan istilah terorisme. Merujuk pada pengertian terorisme dalam UU Anti Terorisme AS, terorisme berkaitan dengan penggunaan kekuatan (*force*) dalam mencapai tujuan politik internasional. Terdapat dua kelompok yang termasuk kategori teroris, yaitu :

- a. Bangsa atau kelompok yang menggunakan kekuatan
- b. Bangsa-bangsa yang membuat keputusan berdasarkan ideologi dan berdasarkan ideologi itu mereka menggunakan kekuatan.<sup>9</sup>

Pada bulan November 2004, Panel PBB mendefinisikan terorisme yaitu *“Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non combatans, when the purpose of such act by its nature or context, is to intimidate a population or compel a government or international organization to do or abstain from doing any act”*. Segala aksi yang dilakukan untuk menyebabkan kematian atau kerusakan tubuh yang serius bagi para penduduk sipil, non kombatan dimana tujuan dari aksi tersebut berdasarkan konteksnya adalah untuk mengintimidasi

---

<sup>8</sup> Opcit Muhammad Taufiq, h.8

<sup>9</sup> Opcit Mardenis, h.87

suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu.<sup>10</sup>

Terorisme lahir dalam konteks historis, sosial dan politik yang khusus. Karena itu tidak ada sebuah definisi tunggal yang mampu memberikan definisi yang pasti mengenai terorisme. Namun, dapat dikatakan bahwa semua definisi terorisme mencakup dan berfokus paling tidak pada faktor utama yakni metode (kekerasan), target (warga sipil) dan tujuan (membangkitkan ketakutan dan memaksakan perubahan politik dan sosial).<sup>11</sup>

#### **4. Gerakan Terorisme Internasional**

Terorisme internasional sebagai aktor bukan negara telah menjadi suatu fenomena baru dalam hubungan internasional. Terorisme internasional menjalankan aksinya lebih dari satu negara. Aktivitas terorisme digolongkan dalam kategori internasional bila terjadi serangan internasional secara langsung oleh suatu fraksi atau golongan terhadap warga negara.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa kelompok terorisme yang tersebar di berbagai wilayah negara. Globalisasi menjadikan batas negara semakin kabur, serta majunya teknologi yang kian pesa menyebabkan jaringan persebaran terorisme semakin meluas. Berikut merupakan beberapa gerakan terorisme menurut yang dirangkum melalui berbagai sumber. Gerakan terorisme sekarang tidak hanya terjadi dalam batas domestik satu negara saja, akan tetapi gerakan terorisme saling berhubungan dan terkoneksi di beberapa negara lain.

---

<sup>10</sup> Opcit Muhammad Taufiq, h.8

<sup>11</sup> Opcit Constantinus, h.60

<sup>12</sup> Opcit Aprilia Restuning Tunggal, h.6

**Tabel 3.1 Daftar Kelompok Terorisme Internasional**

<b>AFRICA</b>	<b>CENTRAL ASIA TERRORISM</b>
Al- Shabaab	Hezb E-Islami Gulbuddin Party of Islam
Ansar Al-Shariq	Islam
Ansar Bayt Al-Maqdis (ABM)	Jaish E-Mohammed (JEM)
Lord Resistance Army (LRA)	Lashkar E-Tayyiba (LT)
Boko Haram	Lashkar E-Jahangui
Al-Qaida in the Lands of Islamic Maghreb (AQIM)	Haqqani Network
Terrorism in North and West Africa	Tehsik E-Taliban Pakistan (TTP)
<b>EUROPE</b>	<b>MIDDLE AEAST</b>
Greek Domestic Terrorism	Al-Nusra Front
Irish Republican Army (IRA)	Al-Qaida Core (AQ)
<b>ASIA</b>	Al-Qaida in the Arabica Peninsula (AQAP)
Afghan Taliban	Hamas
Islami/Bangladesh (HUJI-B)	Hizballah
Aum Shinrikyo (AUM)	Islamic State of Iraq and Levant (ISIL)
Japanese United Army (JPR)	Turkish Domestic Terrorism
<b>SOUTH EAST ASIA</b>	Harakat ul-Mujahideen (HUM)
Abu Sayyaf Group (ASG)	Harakat ul-Jihad-i-Islami (HUJI)
Jemaaah Islamiya	Harakat ul-Jihad-i
Communist Party of Philippines/New People's Army (CPP/NPA)	Palestinian Islamic Jihad (PIJ)
<b>America</b>	Palestine Liberation Front (PLF)
Fuerzas Armandas Revolucionarias de Colombia (FARC)	Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLF)
Comandos Armandos de Liberacion (CAL)	Kahane Chai (Kach)

National Liberation Army

Front de Liberation du Quebec (FLQ)

Dari beberapa gerakan terorisme tersebut, terdapat gerakan terorisme yang menjadi perhatian AS dan bahkan mempengaruhi politik luar negeri AS.

#### **a. Al-Qaeda**

Al-Qaeda lahir dari pergolakan di Afghanistan. Sejarah munculnya Al-Qaeda bisa ditelusuri sejak masa pendudukan Afganistan oleh militer Uni Soviet pada tahun 1980 - 1988. Osama Bin Ladin membentuk al-Qaeda pada tahun 1988. Osama mendirikan kamp-kamp militer untuk merekrut, melatih, dan mempersenjatai para mujahidin asing yang hendak diterjunkan di Afganistan. Untuk itu, al-Qaeda berusaha menyatukan umat Islam untuk melawan Barat khususnya Amerika Serikat dan mengalahkan Israel.

Pada tanggal 11 September 2001, aksi terorisme yang dilakukan Al-Qaeda dengan membajak Pesawat ketiga American Airlines Flight 77 mengitari ibu kota Washington DC dan menabrak sisi barat kompleks markas militer AS Pentagon di Airlington, Virginia. Sejak tahun 2002, al-Qaeda dan kelompok afiliasinya telah melakukan serangan di seluruh dunia, termasuk di Eropa, Afrika Utara, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah.

Organisasi Islam radikal ini telah melakukan sejumlah pemboman yang menewaskan ratusan bahkan ribuan orang. Pada tahun 1998, al-Qaida membom kedutaan AS di Kenya dan Tanzania yang menewaskan 223 orang dan melukai tidak kurang dari 4000 orang. Al-Qaida juga membidani 20 aksi teror di Saudi Arabia yang menewaskan 50 tenaga pengamanan dan melukai lebih banyak

orang lagi. Selanjutnya dan yang paling sukses bagi al-Qaida adalah meruntuhkan menara kembar WTC yang menewaskan lebih kurang 3000 orang. Teror WTC tersebut sungguh menimbulkan efek persepsi, efek psikologis dan efek simbolik yang hebat dalam skala global. Yang lebih menakutkan lagi bagi Amerika Serikat adalah ternyata al-Qaida telah memiliki jaringan di 60 negara di dunia.<sup>13</sup>

Diperkirakan jumlah asuransi yang dibayarkan di seluruh dunia berkaitan dengan serangan 11 September 2001 mencapai US40,2 miliar. Kerugian yang diderita New York akibat serangan 11 tersebut, antara lain hilangnya pekerjaan, hilangnya pemasukan pajak, dan kerusakan prasarana, serta upaya pembersihan mencapai USD 95 miliar. Jumlah kerugian lalu lintas penerbangan AS akibat 11 September karena penutupan ruang udara dan pembatasan lebih lanjut sebesar USD 10 miliar.<sup>14</sup> Bursa efek New York ditutup hingga 15 September dan dibuka kembali pada 17 September 2001. Dengan penutupan ini aktivitas perdagangan dipasar sekuritas mandek. Kerugian ditanggung perusahaan mencapai milyaran rupiah, kerugian akibat serangan teroris terhadap perekonomian AS mencapai USD 40 milyar dan membuat harga saham berguguran.<sup>15</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa aksi terorisme 9/11 oleh Al-Qaeda menimbulkan kerugian materi dan non-material sekaligus meneguhkan keyakinan bahwa terorisme adalah ancaman yang nyata dan menimbulkan trauma psikologis

---

<sup>13</sup> Ahmad Alfajri, *Skripsi Imperialisme Modern: Studi Terhadap Kebijakan War on Terror Presiden Bush Pasca 2001*, 2008, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7522/1/AHMAD%20ALFAJRI-FUH.pdf> diakses pada 25 November 2016, h.42.

<sup>14</sup>“*Biaya dan Kerugian Akibat Terorisme*” dalam [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/09/110909\\_september.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110909_september.shtml) diakses pada 25 November 2016.

<sup>15</sup>“*Dampak Serangan 11 September 2001 Terhadap Kinerja Pasar Modal Indonesia*” dalam <http://warsono.staff.umm.ac.id/files/2010/02/Dampak-Serangan-World-Trade-Center-Terhadap-Kinerja-Pasar-Modal-Indonesia-Warsono.pdf> diakses pada 25 November 2016.

dan mental masyarakat Amerika. Fakta tersebut kemudian menjadikan AS perlu menyusun strategi dalam melawan terorisme. Sehari setelah penyerangan Presiden Bush kemudian menyatakan perang melawan terorisme. Al-Qaida kemudian dicatat sebagai sasaran utama kampanye *war on terrorism* Amerika Serikat. Presiden Bush juga menyebut Irak, Iran dan Korea Utara sebagai poros setan (*axis of evil*) negara yang mendukung teroris.

Tak lama setelah serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, pemerintah AS memimpin invasi internasional ke Afghanistan untuk menjatuhkan pemerintahan Taliban yang melindungi Osama bin Laden dan pengikutnya.<sup>16</sup> Seperti dikabarkan *CNN*, Menhan AS kala itu, Donald Rumsfeld mengatakan, di hari pertama, ada 15 bom yang diluncurkan dari darat, 25 serangan udara, sementara kapal tempur dan kapal selam AS dan Inggris menembakkan 50 rudal Tomahawk.<sup>17</sup> Amerika Serikat secara penuh memerangi Al-Qaeda dengan kurun waktu 2001-2011 dengan memobilisasi militer, serangan udara, pengiriman pasukan militer. Kemudian titik puncak interaksi antara keduanya ditandai dengan penyerangan markas Al-Qaeda yang dikenal dengan operasi *Geronimo* yang dilakukan pasukan *Navy Seals* Amerika Serikat pada Mei 2011. Pada operasi tersebut, badan intelijen Amerika dan didukung pemerintah Afghanistan, berhasil menangkap Osama bin Laden dan mengeksekusi hukuman mati terhadap Osama bin Laden. Terbunuhnya Osama bin Laden sebagai

---

<sup>16</sup> “Sepuluh Tahun Setelah Serangan 11 September” dalam [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2011/09/110906\\_pengattarseptember.shtml](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/09/110906_pengattarseptember.shtml) diakses pada 28 November 2016.

<sup>17</sup> “7-10-2001: Amerika Serikat Kobarkan Perang di Afghanistan” dalam <http://global.liputan6.com/read/2115168/7-10-2001-amerika-serikat-kobarkan-perang-di-afghanistan> diakses pada 28 November 2016.



pemimpin Al-Qaeda tidak menjadikan Al-Qaeda hilang sebagai gerakan terorisme, keaktifan Al-Qaeda menurun pasca kematian Osama akan tetapi eksistensi Al-Qaeda tidak sepenuhnya hilang. Al-Qaida aktif merekrut pejuang-pejuang baru di kawasan yang didera konflik. Setelah kematian Osama bin Laden, Al-Qaida meninggalkan Asia Selatan dan beralih ke Timur Tengah dan berkolaborasi dengan organisasi ekstremis lokal.

#### **b. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)**

ISIL adalah negara Islam yang dideklarasikan pada tahun 2013 oleh Syaikh Mujahid Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Husainiy Al-Quraysiy. Pada awalnya, gerakan ini bernama *Jamaat al-Tawhid wa i-Jihad* (JTJ) yang dibentuk oleh Abu Mus'ab Az-Zarqawi, dimana kelompok ini mulanya ber-*bai'at* kepada Al-Qaeda. Pada tahun 2006, gerakan ini berubah nama menjadi *Islamic State of Iraq* (ISI) dengan tujuan membentuk Daulah Islamiyah di Irak dengan cara melengserkan pemerintahan disana dalam rangka menyelamatkan masa depan Irak.<sup>18</sup> Pada tanggal 9 April 2013, Abu Bakar Al-Baghdadi mengganti nama ISI menjadi *Islamic State of Iraq and Syria the Levant* (ISIL) karena adanya perluasan wilayah mencakup Suriah, termasuk Raqqa yang kemudian diklaim sebagai ibukota ISIL. Namun karena adanya perselisihan visi misi antara ISIS dan Al-Qaeda serta perbedaan strategi dalam mencapai tujuan mereka, maka pada tanggal 3 Februari 2014, Al-Qaeda menyatakan bahwa ISIL yang merupakan kelompok berideologi Salafi Jihadis ini, tidak berafiliasi dan tidak berhubungan dengan Al-

---

<sup>18</sup> Zhivanah Astri Ulfah, *Skripsi Strategi Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) Untuk Mempengaruhi Pengikutnya*, HI UMY 2016, h.1-2

Qaeda. Selanjutnya, ISIL berganti nama lagi menjadi *Islamic State (IS)* tanggal 29 Juni 2014 dengan tujuan merangkul seluruh umat Islam di dunia untuk membentuk suatu khilafah Islamiyah tanpa ada batasan hanya di Irak maupun Suriah.<sup>19</sup> ISIL sekarang memperlebar jangkauan terornya jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya, tidak hanya di Suriah maupun Irak akan tetapi meluas ke Timur Tengah, Eropa dan Asia.

ISIL juga dikenal sebagai DA'ESH atau DA'ISH, kelompok ini ditunjuk sebagai Organisasi Teroris Asing pada tanggal 17 Desember tahun 2004.<sup>20</sup> Kelompok militan ini memiliki sekitar 20.000 hingga 31.500 anggota di lapangan, demikian perkiraan badan intelijen Amerika CIA.<sup>21</sup> ISIL dianggap ancaman terbesar bagi keamanan dunia. Bahkan pada tahun 2015 lalu, ISIL menumbangkan nyawa 6.073 orang dan melukai 5.799 lainnya lewat 1.071 serangan teror. Suriah, Irak, dan Turki, serta negara-negara Eropa adalah target ISIL.<sup>22</sup> ISIL terlibat dalam berbagai serangan teror di beberapa negara. Salah satu aksi teror yang dilakukan oleh ISIL adalah serangan bom bunuh diri, penembakan serta penyanderaan yang terjadi di Paris pada 13 September 2015 atau "*Friday The 13th*" dan serangan bom di Sarinah, Jakarta pada 14 Januari 2016.

Kemunculan ISIL sebagai bentuk gerakan terorisme yang memiliki wilayah dan militer yang lebih kuat dan radikal menjadikannya sebagai perhatian dunia internasional. Dalam memerangi ISIL, AS membentuk koalisi internasional

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> "*Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)*" dalam <https://www.nctc.gov/site/groups.html> diakses pada 12 November 2016.

<sup>21</sup> <http://www.dw.com/id/jumlah-militan-isis-jauh-lebih-besar-dari-perkiraan/a-17917365> diakses pada 28 November 2016.

<sup>22</sup> <https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/5-kelompok-teroris-paling-mematikan-di-dunia-siapa-saja-mereka> diakses pada 28 November 2016.

yaitu *Operation Inherent Resolve* dengan 60 negara anggota baik negara-negara Timur Tengah maupun luar Timur Tengah. AS berkerjasama dengan negara-negara internasional untuk memerangi ISIL. Pada 4 Oktober 2016, koalisi tersebut telah melakukan total 15.481 serangan dalam memerangi ISIS. AS telah melakukan 11.973 serangan di Irak dan Suriah (6812 Irak / 5161).<sup>23</sup> Secara geografis, wilayah operasi militer ISIL sangat jauh jaraknya dari Amerika dan bahkan ancaman ISIL tidak secara langsung dihadapi oleh AS, bahkan AS bukan menjadi sasaran atau target utama ISIL berbeda dengan Al-Qaeda yang menargetkan AS menjadi sasaran utama, akan tetapi AS menaruh perhatian yang sangat besar dalam memerangi ISIL.

Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah dengan *core interest* kepentingan menjaga ladang minyak seolah mendapat ancaman dari ISIL. Timur Tengah adalah suatu kawasan yang sejak dulu hingga kini tidak pernah lekang dari beragam latar belakang ancaman. Namun ancaman terhadap hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah berarti mengusik kedigdayaan sumber daya Amerika Serikat untuk menertibkannya.<sup>24</sup> Kuatnya kepentingan AS untuk menguasai minyak dikawasan ini juga pernah dilontarkan oleh Chomsky dan Albert (1991). AS hanya mempunyai cadangan minyak yang sangat kecil yakni sekitar 0,3% dari cadangan minyak dunia, sedangkan kebutuhan konsumsi minyak AS mencapai 23%.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> “*Strikes in Iraq and Syria*” dalam <http://www.defense.gov> diakses pada 4 November 2016.

<sup>24</sup> Obsatar Sinaga, *ISIS dan Ancaman di Timur Tengah*, dalam <https://koran.tempo.co/konten/2014/08/05/348310/ISIS-dan-Ancaman-di-Timur-Tengah> diakses pada 28 November 2016.

<sup>25</sup> Budi Winarno, *Demokratisasi dan Perdamaian di Irak dan Timur Tengah*, Jurnal Hubungan Internasional Volume III No.1 Agustus 2007, h.428

Keberadaan ISIL sebagai kelompok fundamental (teroris) yang beroperasi di Suriah dan Irak akan sangat memungkinkan untuk memperluas wilayah aneksasinya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian dari Amerika Serikat, yang kemudian menjalankan intervensinya karena ISIL dianggap mengganggu kepentingan nasional di Irak secara politik, yaitu berkaitan dengan upaya Amerika Serikat dalam membangun supremasi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Ini disebabkan karena ISIL menjadi organisasi yang menggunakan masyarakat sipil sebagai target, selain pemerintah Irak dan Suriah. Kemudian kepentingan Amerika Serikat selanjutnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan keamanan, yaitu upaya mengamankan ekspor dari Irak ke Amerika Serikat. Inilah yang menjadi titik temu atas intervensi Amerika Serikat dalam menangani pemberontakan ISIL di Irak tahun 2014.<sup>26</sup>

Amerika Serikat memberikan pinjaman senilai US\$2,7 miliar atau sekitar Rp35 triliun kepada pemerintah Irak untuk mendanai perang melawan kelompok yang menamakan diri ISIL. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli amunisi dan merawat pesawat tempur F-16, tank, helikopter tempur dan dan peralatan militer lain.<sup>27</sup>

## **B. Kebijakan AS Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme**

*War on Terror* (WOT) adalah sebuah perangkat kebijakan luar negeri terhadap ancaman terorisme yang menjadi fokus utama kebijakan politik luar

---

<sup>26</sup> Citra Ayu Rahmadani, *Skripsi Kepentingan Amerika Serikat Dalam Menangani Pemberontakan Islamic State of The Iraq and Syria di Irak Tahun 2004*, HI UMY 2015, h. 13-14

<sup>27</sup> "Irak dapat pinjaman dari AS untuk perangi ISIS" dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160629\\_dunia\\_amerika\\_isis](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/06/160629_dunia_amerika_isis) diakses pada 28 November 2016.

negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush dan Obama. War on teror menjadi prioritas utama sejalan dengan banyaknya gerakan teroris yang bermunculan di beberapa kawasan.

Melalui instrumen politik dan diplomasi, militer dan intelijen serta ekonomi Amerika Serikat berupaya memberantas keberadaan teroris di seluruh dunia demi menjaga keamanan dunia.<sup>28</sup> Perang melawan terorisme ternyata menjadi prioritas utama dari kebijakan luar negeri AS menggantikan prioritas sebelumnya seperti demokrasi dan promosi hak asasi manusia.<sup>29</sup>

### **1. War on Terrorism Era Presiden George W Bush**

Setelah 9/11, Presiden George W. Bush menyatakan "*global war on terror*" (GWOT) dengan menyebutkan "*either you are with us or you are with the terrorists*". Pernyataan bahwa AS perlu melakukan tindakan strategis melawan terorisme menunjukkan bahwa masa Obama merupakan masanya *war against terrorism* yang kemudian menjadi Doktrin Bush yang diikuti dengan ditatapkannya kebijakan-kebijakan *war on terror* serta operasionalitas kebijakan tersebut.

---

<sup>28</sup> Tiara Putri Khairani, *Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan War on Terrorism pada masa Pemerintahan Bush : Studi Kasus Perang Amerika Terhadap Al Qaeda*, dalam <http://etd.repository.ugm.ac.id> diakses pada 1 Maret 2016.

<sup>29</sup> Ali Muhammad, *International Context of Indonesia's Counterterrorism Policy 2001-2004*, dalam <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/542/526> diakses pada 27 November 2016, h.139

## **a. Kebijakan War on Terrorism Era George W Bush**

Setelah menyatakan perang melawan terorisme, Presiden George W Bush langsung mengeluarkan beberapa kebijakan terkait *war on terrorism* yaitu, antara lain :

### **i. Pembentukan USA Patriot Act dan Homeland Security**

Setelah serangan 9/11, *USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act)* mulai diberlakukan pada 26 Oktober 2001. UU ini dibuat untuk memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk mengatasi terorisme. Dalam point-pointnya dijelaskan penanggulangan upaya terorisme dilakukan dengan cara : mengizinkan penyadapan telepon, rekaman, dan komputer oleh pemerintah, memfasilitasi instansi pemerintah untuk akses informasi serta pengawasan buku-buku dan produk-produk yang dihasilkan rumah sakit dan perpustakaan.<sup>30</sup> Langkah adalah dengan membentuk Departemen yang ditujukan untuk keamanan dan melindungi warga negara AS dari ancaman terorisme. *Department of Homeland Security* adalah gabungan 22 departemen federal dan lembaga menjadi, agen kabinet terintegrasi terpadu yang didirikan pada 25 November tahun 2002. Tujuan dibentuknya *Department Homeland Security* adalah untuk mengawasi dan mengkoordinasikan strategi nasional yang komprehensif untuk melindungi negara terhadap terorisme dan menanggapi setiap serangan di masa depan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty* dalam <https://www.justice.gov/archive/ll/highlights.htm> diakses pada 1 November 2016.

<sup>31</sup> "History" dalam <https://www.dhs.gov/history> diakses pada 1 November 2016.

## ii. Counter – terrorism

*Counterterrorism is a strategy intended to prevent or counter terrorism.*<sup>32</sup> Counter terorisme adalah strategi yang dikeluarkan AS untuk mencegah atau melawan gerakan terorisme yang ditetapkan setelah terjadinya serangan 11 September 2001. Counterterorisme menggunakan beberapa instrumen yaitu diplomasi, kekuatan militer, dan kecerdasan, serta kemungkinan penggunaan intelegent untuk aksi rahasia.<sup>33</sup>

## iii. US National Security Strategy

*US National Security Strategy* merupakan dokumen yang mewakili kebijakan luar negeri Presiden Bush sebagai pernyataan perang terhadap terorisme. Dalam dokumen tersebut konsep keamanan nasional mengalami perubahan yang besar dan mendasar dengan memasukkan konsep pre-emption yang terfokus pada kemungkinan serangan teroris dan penyebaran senjata pemusnah massal. Konsep pre-emption sendiri mengandung arti inisiatif untuk melakukan aksi ofensif demi melumpuhkan kekuatan musuh sebelum musuh tersebut dapat menyerang.<sup>34</sup> Hal ini yang kemudian mencetuskan Doktrin Bush, merujuk pada serangkaian kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Bush dari kebijakan utamanya memperbolehkan *pre-emptive war* terhadap lawan-lawan potensial sebelum mereka menyerang AS.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> “Arti, definisi, pengertian counterterrorism” <http://www.bahasaindonesia.net/counterterrorism>, tanggal akses : 01 November, 2016.

<sup>33</sup> Paul R. Pillar, *Terrorism and U.S. Foreign Policy*, (Washington DC : Brooking Institution Press, 2003), h.73

<sup>34</sup> Sri Winingsih, *Disertasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran (Periode 1997-2008)*, FISIP UI 2009, dalam [lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128593-T%2026778) *Kebijakan%20luar%20negeri.pdf* diakses pada 2 November 2016.

<sup>35</sup> Rachmat, *Doktrin Bush: Jawaban yang tepat untuk Terorisme*, dalam <http://rachmat.staff.ugm.ac.id/kuliah/PLNAS/bushdoctrine.pdf> diakses pada 2 November 2016.

## b. Operasionalisasi Kebijakan War on Terrorism Era George W Bush

Serangan terorisme ke jantung pertahanan AS mendorong Presiden George Walker Bush dan Kongres mengutamakan kekuatan militer untuk menyokong kebijakan luar negeri AS dengan mengedepankan unilateralisme, dengan atau tanpa persetujuan organisasi internasional.<sup>36</sup> Dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, Bush cenderung memanfaatkan penggunaan kekuatan militer dan penggunaan kekuatan ekonomi dalam mengoperasionalkan kebijakannya.

Era Bush menjadi era dimana budget militer mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding periode yang sebelumnya. Anggaran untuk Departemen Pertahan pada tahun 2001-2008 pada pemeritahan Bush sebanyak \$3,786 triliun. Untuk anggaran war on terror itu sendiri adalah \$768,3 milyar.<sup>37</sup>

**Tabel 3. 2 Pengeluaran Militer Pemerintah AS**



Sumber: <http://www.cfr.org/defense-budget/trends-us-military-spending/p28855> diakses pada 29 November 2016.

<sup>36</sup> Opcit A. Safril Mubah, h.67-69

<sup>37</sup> "DOD Topline FY 2001-2017" dalam [http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0217\\_budget](http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0217_budget) diakses pada 29 oktober 2016.



Dalam dolar disesuaikan dengan inflasi, ukuran Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) untuk pengeluaran militer AS meningkat tajam setelah serangan teroris tahun 2001. Penurunan ini, banyak menyita angka pada operasi AS di Timur Tengah.<sup>38</sup> Selama delapan tahun masa jabatan, Presiden Bush menghabiskan hampir dua kali lebih banyak anggaran pendahulunya, Presiden Clinton. Disesuaikan dengan inflasi, dalam delapan tahun, Presiden Clinton meningkatkan anggaran federal dengan 12,5%. Dalam delapan tahun, Presiden Bush mengalami defisit sebanyak 53%. Memang benar bahwa anggaran pertahanan meningkat secara dramatis sejak akhir 1990-an, terutama sejak 9/11 dan awal perang di Irak dan Afghanistan. Namun, belanja nondefense meningkat juga. Beberapa juga berpendapat bahwa banyak dari peningkatan belanja nondefense berasal dari peningkatan belanja Departemen Homeland Security.<sup>39</sup>

Kebijakan counter terorisme diterjemahkan Bush dengan penggunaan mobilisasi bantuan ekonomi dan militer. Adanya fakta peningkatan bantuan asing untuk mengkampanyekan perang global melawan terorisme ke negara-negara yang cenderung diidentifikasi memiliki kasus terorisme dan peluang menjadi tempat tumbuh kembangnya terorisme. Penggunaan *carrots* berupa bantuan ekonomi yang awalnya mengalami embargo, seperti Indonesia.

Pemerintah AS melalui Duta Besar AS, Ralph L. Boyce, pernah mengancam menjatuhkan sanksi kepada Indonesia dengan menggunakan Patriot Act jika Financial Action Task Force (FATF) masih melihat Indonesia tidak

---

<sup>38</sup> <http://www.cfr.org/defense-budget/trends-us-military-spending/p28855> diakses pada 29 November 2016.

<sup>39</sup> <https://www.mercatus.org/publication/spending-under-president-george-w-bush> diakses pada 29 November 2016.

kooperatif mengupayakan pembrantasan pencucian uang. Tekanan terhadap Indonesia mengharuskan adanya Strategi Nasional Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membentuk Rezim anti Pencucian Uang tahun 2002.<sup>40</sup> Untuk membujuk pemerintah Indonesia dalam ikut serta counter terrosime, AS juga menyediakan bantuan dalam bentuk Anti-Terrorisme Assistance (ATA). Indonesia adalah penerima utama dari program ATA. AS menyediakan bantuan ekonomi (*carrots*) terhadap Indonesia - bersama dengan Pakistan, India, dan Filipina menjadi fokus dari upaya counter terrorisme pemerintahan Bush di Asia Selatan dan Asia Tenggara karena kepentingan strategis mereka, populasi muslim yang besar dan gerakan pemberontakan, dengan link ke group teroris dan lebih berfokus pada aspek-aspek peningkatan kekuatan militer. Pemerintah Bush juga berjanji untuk mengurangi secara bertahap embargo militer di militer Indonesia.<sup>41</sup> AS juga berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. Indikasi peningkatan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dapat dilihat dari tersedianya beberapa fasilitas militer yang diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk kepentingan AS. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi kekuatan darat (seperti penempatan pasukan, daerah latihan, dan logistik), fasilitas pelabuhan (meliputi fasilitas dok, dan kunjungan kapal perang), dan penggunaan fasilitas ruang udara dan transit, serta kegiatan inteligen.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Nurul Istiqomah, *Tinjauan Kriminologi Analisis*, FISIP UI 2009, dalam [lib.ui.ac.id/file?file=digital/128756-T%202026732-Tinjauan%20kriminologi-Analisis.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128756-T%202026732-Tinjauan%20kriminologi-Analisis.pdf) diakses pada 28 November 2016.

<sup>41</sup> Opcit Ali Muhammad, h.148-152

<sup>42</sup> Opcit Kiki, h.4

Berdasarkan fakta anggaran yang digunakan Presiden Bush tersebut, menunjukkan adanya trend kenaikan dalam anggaran yang dikeluarkan untuk memerangi terorisme. Besarnya anggaran tersebut digunakan untuk mengerahkan mobilisasi pengiriman pasukan ke Afghanistan dan Irak serta memobilisasi fasilitas senjata. Hal ini sangat jelas terlihat pada aplikasi kebijakan *US National Security Strategy (NSS-2002)*. Yaitu pada keputusan Presiden Bush untuk menginvasi Afghanistan pada 7 Oktober 2001 untuk menggulingkan pemerintahan Taliban karna Taliban dianggap melindungi teroris Al-Qaeda. Invasi dilakukan dengan mengerahkan mobilisasi pasukan militer serta serangan darat dan udara ke Afghanistan. Invasi selanjutnya yaitu, invasi AS ke Irak pada 19 Maret 2003 dengan mengirimkan pasukan tentara dalam Operasi Pembebasan Irak. Irak dianggap sebagai teroris karna kepemilikan senjata pemusnah masal (*weapon mass destruction*).

Kuatnya keinginan George W Bush untuk menginvasi Irak dan menurunkan Saddam Husein yakni karna penghancuran program senjata pemusnah masal (*weapon mass destruction*). Program pengembangan senjata pemusnah masal dianggap sebagai ancaman bagi AS dan dunia, satu-satunya jalan adalah dengan serangan militer karna Saddam dianggap tidak kooperatif dengan tim inspeksi PBB. Selain itu Saddam Hussein dalam pandangan Presiden Bush dianggap sebagai pemimpin yang otoriter, invasi militer menjadi satu-satunya jalan menjatuhkan Saddam Husein.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Opcit Budi Winarno, h.426-427

Baik invansi AS ke Afghanistan maupun Irak, invansi terhadap keduanya dilakukan dengan selalu menunjukkan adanya peningkatan pasukan militer dan serangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta jumlah peningkatan pasukan yang dikirim AS ke Afghanistan dan Irak. Fakta tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Tentara Amerika Serikat di Afghanistan dan Iraq**  
**Tahun 2002 – 2012**

Reported FY02-FY08, Estimated FY09-FY12, Rounded to Hundreds

Fiscal Year/Country	Afghanistan	Iraq	Total	Percentage Change		
				Annual	Since FY2003	Since FY2008
FY2002	5,200	0	5,200	NA	NA	NA
FY2003	10,400	67,700	78,100	1402%	NA	NA
FY2004	15,200	130,600	145,800	87%	87%	NA
FY2005	19,100	143,800	162,900	12%	109%	NA
FY2006	20,400	141,100	161,500	-1%	107%	NA
FY2007	23,700	148,300	172,000	7%	120%	NA
FY2008	30,100	157,800	187,900	9%	141%	NA
FY2009	50,700	135,600	186,300	-1%	139%	-1%
FY2010	63,500	88,300	151,800	-19%	94%	-19%
FY2011	63,500	42,800	106,200	-30%	36%	-43%
FY2012	63,500	4,100	67,500	-36%	-14%	-64%

Sumber : Amy Belasco, 2009, *Troop Levels in the Afghan and Iraq Wars FY2001-FY2012: Cost and Other Potential Issues*, dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40682.pdf> diakses pada 29 November 2016.

Antara tahun anggaran (TA) 2002 dan TA 2008, jumlah pasukan di Afghanistan dan Irak meningkat dari 5.200 pasukan ke puncak 172.000. Jumlah pasukan pertama meningkat tajam di tahun fiskal 2003 dengan invasi ke Irak ketika kekuatan pasukan di dalam negeri mencapai 78.000 untuk kedua perang.

Angka ini tidak termasuk tentara di kapal atau digunakan di wilayah tersebut. Antara tahun fiskal 2003 dan TA 2005, jumlah pasukan bulanan rata-rata dua kali lipat dari 78.100 pasukan ke 162.900 pasukan, mencerminkan kenaikan di Afghanistan dan Irak. Ada sedikit perubahan di TA 2006. Kemudian pada Januari 2007, Presiden Bush mengumumkan keputusannya untuk mengirim lima *Brigade Combatte Team* ke Irak, lonjakan sementara jumlah tentara untuk memadamkan meningkatnya kekerasan. Rata-rata kekuatan naik di TA 2007 dan TA 2008 karena pasukan tambahan serta peningkatan tambahan dalam Afganistan. Rata-rata kekuatan untuk kedua perang memuncak di 187.900 pasukan di TA 2008.<sup>44</sup>

Selama invansi, kekuatan pasukan rata-rata untuk kedua perang tumbuh dari 161.500 pasukan di TA 2006 untuk 172.000 pasukan di TA 2007, meningkat 10.500 pasukan atau 7%. Tahun berikutnya, di TA 2008, mencapai puncaknya yaitu 187.900 pasukan, meningkat dari yang lain 15.900 pasukan atau 9%. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah tentara di Afghanistan serta lonjakan di Irak.<sup>45</sup>

Dalam menerapkan kebijakan *war on terrorism* terorisme Bush mengaplikasikan penggunaan *hard power* dalam memerangi terorisme. Dengan ciri yaitu kekuatan militer menjadi instrument utama dalam politik luar negerinya demi mencegah adanya serangan terorisme. Dengan mengedepankan kemampuan memaksa, menggunakan sanksi hukum atau embargo, ancaman, perlindungan atau hingga serangan militer. Penggunaan konfigurasi kekuatan adalah kunci

---

<sup>44</sup> Amy Belasco, *Troop Levels in the Afghan and Iraq Wars FY2001-FY2012: Cost and Other Potential Issues*, 2009, dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R40682.pdf> diakses pada 29 November 2016.

<sup>45</sup> Ibid

utamanya, strategi ini mempertahankan bahwa hanya kekuatan AS yang besar yang bisa menjamin kedamaian. Amerika Serikat dibawah Bush cenderung menggunakan *hard diplomacy* sebagai jalan terakhir diplomasi demi mencapai kepentingan nasional yakni *peace and security*.<sup>46</sup> Kebijakan war on terrorism era Presiden Bush diterjemahkan dengan melalui pendekatan-pendekatan mobilisasi kekuatan militer (*sticks*) dan penggunaan kekuatan ekonomi (*carrots*).

## **2. War on Terrorism Era Presiden Barack Obama**

Berakhirnya era kepemimpinan Presiden Bush digantikan oleh Barack Obama yang merupakan pemenang pemilu 2008 dengan slogan kampanye "*change we can beleive in*". Selama waktu kampanye, Obama menyatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan program *war against terorisme* yang dijalankan oleh Bush. Bush dianggap memperburuk citra AS dimata dunia. Kritik Obama terhadap Bush adalah tindakan perang di Iraq yang justru mengalihkan perhatian dari perang sesungguhnya di Afghanistan dan Pakistan, menambah jumlah pasukan, memperluas daerah operasi militer, dan melancarkan serangan lintas batas secara sistematis.<sup>47</sup> Dalam menjalankan kebijakan *war against terrorism*, Obama mengambil kebijakan yang berbeda yang selama ini ditetapkan oleh Presiden Bush.

---

<sup>46</sup> Opcit Aprylia Nur Amrina, h.58-60.

<sup>47</sup> <https://m.hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/barack-obama-harapan-semu/> diakses pada 29 November 2016.

### **a. Kebijakan War on Terrorism Era Barrack Obama**

Dalam menanggapi ancaman gerakan terorisme internasional, Presiden Barrack Obama mengeluarkan beberapa kebijakan yang berbeda dengan era Presiden Bush, antara lain :

#### **h. Pendekatan dengan Negara-Negara Muslim**

Obama dalam menerapkan *war on terror* dengan melakukan pendekatan dengan negara-negara Muslim. Secara *geopolitic, geoeconomy dan geostrategy* wilayah Asia pasific dan Asia Tenggara merupakan salah satu modal AS yang diperhatikan. AS melihat kawasan Asia Pasific adalah kawasan yang menjanjikan dalam hal ekonomi. Ekonomi juga merupakan landasan yang kuat dalam politik AS dibawah Obama. Selain itu, negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah memiliki peranan penting sebagai objek PLN AS. Nilai penting ini menyangkut perluasan pengaruh, hingga kepentingan perekonomian, misalnya target penjualan senjata, mitra kerjasama, pangsa pasar dan lainnya.<sup>48</sup> Pendekatan terhadap negara-negara muslim bertujuan untuk mengembalikan citra AS sebagai *guardian of diplomacy* yang mengutamakan perdamaian. Hal ini dikarenakan, setelah isu terorisme menjadi kebijakan yang mengglobal, Islam dicurigai sebagai agama yang melahirkan ideologi radikalisme yang dianut oleh terorisme, muslim kemudian menjadi korban atas munculnya miss persepsi tersebut, banyaknya penganiayaan dan sentiment negatif tentang muslim. Pendekatan itu juga ditujukan untuk merangkul negara-negara muslim berkerjasama memerangi terorisme.

---

<sup>48</sup> Opcit Aprylia Nur Amrina, h.86

## **ii. Comprehensive Partnership**

Salah satu kerjasama *comprehensive partnership* adalah antara AS dengan Indonesia. Asia tenggara merupakan kawasan dengan jumlah muslim lebih dari 200 juta jiwa yang rentan dengan munculnya gerakan terorisme regional. Indonesia adalah negara mayoritas muslim terbesar yang pernah menjadi korban serangan terorisme dan menjadi sarang terorisme. AS berusaha membangun hubungan diplomatik dan militer dengan negara Indonesia dimana Indonesia merupakan sekutu penting Amerika di dunia muslim. Obama tetap dengan programnya menetralsir pengaruh terorisme di negara-negara Islam melalui kampanye dan kunjungan tema pentingnya kerjasama internasional untuk melawan terorisme.<sup>49</sup>

## **iii. Pembentukan Koalisi Internasional**

Dalam upaya memerangi terorisme, salah satu kebijakan yang dibentuk pada masa pemerintahan Obama adalah pembentukan koalisi internasional yang ditujukan untuk menghimpun kekuatan bersama dalam memerangi ancaman terorisme dengan adanya koalisi, dengan adanya kolasi diharapkan adanya *sharing power* dan *responsibilities*. Salah satu koalisi internasional yang dibentuk AS adalah koalisi Operation Inherent Resolve. Koalisi ini dibentuk pada 15 Oktober 2014 oleh Departemen Pertahan AS dengan tujuan untuk memerangi ancaman terorisme yaitu khususnya gerakan ISIS, tercatat 60 negara sebagai anggota Koalisi oleh Departemen Luar Negeri AS termasuk Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jordan, Belanda, Inggris, Bahrain, Turki, Saudi

---

<sup>49</sup> Ibid, h.97-98

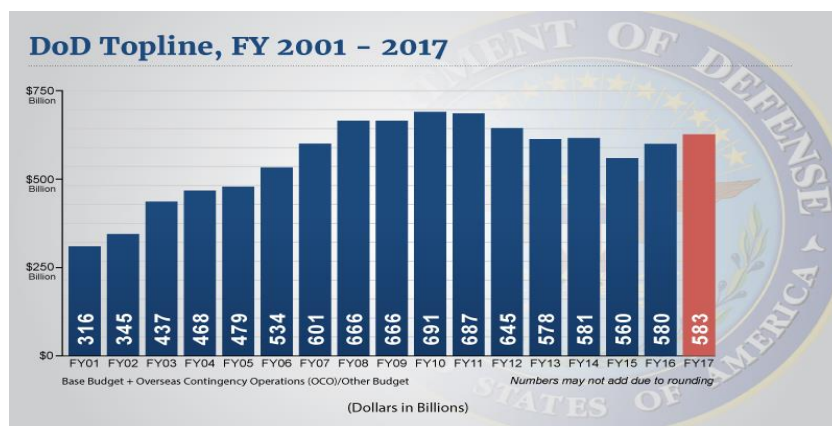


Arabia, Uni Eminat Arab dan dengan berbagai negara baik dengan sekutu-sekutunya di Timur Tengah maupun diluar Timur Tengah. AS melakukan serangan bersama koalisi sebanyak 3.508 serangan udara yakni sebanyak 3.236 serangan ke Irak dan 272 serangan Suriah.<sup>50</sup>

### b. Operasionalisasi Kebijakan War on Terrorism Era Barack Obama

Peralihan kursi kepresidenan dari Bush ke Obama menyisahkan beberapa persoalan salah satunya yaitu ekonomi. Pada masa pemerintahan Bush, terjadi defisit USD 4 trilyun. Obama kemudian mengambil langkah memangkas beberapa anggaran dalam pemerintahannya. Akan tetapi pada pemerintah Obama, anggaran untuk Depatemen Pertahanan (DOD) dan anggaran untuk *war on terrorism* mengalami kenaikan.

**Tabel 3.4**  
**Anggaran Dana Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DOD)**  
**Tahun 2001 - 2017**



Sumber : [http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0217\\_budget](http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0217_budget) diakses pada 29 November 2016.

<sup>50</sup>“*Strikes in Iraq and Syria*” dalam <http://www.defense.gov> diakses pada 4 November 2016.

Pada pemerintahan Obama tahun 2008-2016 anggaran untuk Departemen Pertahanan AS (DOD) yaitu sebanyak \$4.988 triliun dengan rincian anggaran *war on terror* sebanyak \$935,9 milyar.<sup>51</sup> Anggaran Obama terbaru mengusulkan kenaikan 7,8 persen dalam basis Departemen Pertahanan anggaran antara tahun 2015 dan 2016.<sup>52</sup> Kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk keputusan pemerintah Obama untuk mulai melakukan penarikan dan pengurangan pasukan AS (*deployemnt military withdrawal*) dari Irak dan Afghanistan. Anggaran untuk OCO diharapkan turun di TA 2016, sesuai dengan penarikan pasukan dari Afghanistan, dari USD 64,2 milyar hingga ke USD 50,9 milyar pengurangan sekitar 21%.<sup>53</sup>

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa dana anggaran untuk Departemen Pertahan AS era Presiden Obama sangat tinggi, bahkan rata-rata melebihi anggaran periode sebelumnya yaitu anggaran di Era Bush yang dicap sebagai Presiden paling boros. Anggaran dana Departemen Pertahanan Era Obama tidak hanya digunakan sepenuhnya untuk operasi militer, memfasilitasi alutsista, membiyayai logistik pasukan, peningkatan fasilitas-fasilitas militer untuk perang melawan teroris saja, akan tetapi juga untuk membiyayai penarikan pasukan militer AS di luar negeri dan membiyayai kegiatan yang sifatnya *soft* seperti pengiriman tentara AS ke luar negeri untuk misi kemanusiaan. Aktivitas militer era Obama tidak hanya kegiatan aktivitas yang digunakan untuk menakut-nakuti,

---

<sup>51</sup> “DOD Topline FY 2001-2017” dalam [http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0217\\_budget](http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0217_budget) diakses pada 29 oktober 2016.

<sup>52</sup> <http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2015/dec/14/politifact-sheet-our-guide-to-military-spending-/> diakses pada 30 November 2016.

<sup>53</sup> [http://www.slate.com/articles/news\\_and\\_politics/war\\_stories/2015/02/president\\_obama\\_s\\_enormous\\_defense\\_budget\\_it\\_favors\\_big\\_weapons\\_systems.html](http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2015/02/president_obama_s_enormous_defense_budget_it_favors_big_weapons_systems.html) diakses pada 29 November 2016.

mengancam, menekan, memaksa (*coersif*) maupun melakukan serangan-serangan namun, tentara dihumanisasi dengan dilekatkan nilai-nilai kemasyarakatan untuk melakukan fungsi-fungsi yang selama ini biasanya dilakukan oleh sipil seperti mengajar, menjadi relawan kesehatan, membangun fasilitas publik seperti halnya di Afghanistan, dan negara-negara Pasifik melalui “*Operation Pasific Angel*”.

Operasi Pasific Angel membantu negara-negara yang mengalami persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan seperti bencana, wabah, kelaparan, kemiskinan, kekeringan dan buruknya tingkat kesehatan. Peralatan militer tidak hanya digunakan untuk melakukan operasi militer, akan tetapi transportasi militer digunakan untuk fungsi darurat kemanusiaan seperti sebagai Rumah Sakit berjalan, untuk pengiriman logistik bantuan. Tentara dikirim untuk membantu memperbaiki sanitasi, memberikan fasilitas kesehatan masyarakat, membangun fasilitas umum, maupun menjadi tenaga sukarelawan pendidikan dan kesehatan.

Operation Pacific Angel merupakan misi bantuan kemanusiaan disponsori oleh *US Pasific Comando* (USPACOM) untuk memberikan bantuan kemanusiaan sipil (*humanitarian civic assistance*) dan operasi sipil-militer (*civil-military operations*) ke daerah-daerah yang membutuhkan di wilayah Pasifik. Operasi Pacific Angel adalah operasi sipil-militer bersama yang dipimpin oleh AS Pacific Air Forces untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain dalam hal bantuan bencana kemanusiaan. Bersama dengan negara tuan rumah personil militer dan sipil di seluruh wilayah, itu telah meningkatkan kehidupan puluhan ribu orang.

Salah satu daerah tujuan Operasi Pasific Angel adalah di Jaffna, Sri Lanka pada Agustus 2016 dengan memberikan perawatan medis umum untuk

sekitar 4000 orang dan merenovasi enam sekolah yang melayani total 1.100 siswa, akses gratis ke layanan kesehatan. Bantuan medis untuk prosedur gigi, terapi fisik, perawatan umum, dan otopedri diadakan di Idaikkadu Maha Vidyalayam (15-17 Agustus) dan Punguduthivu Sri Subramaniya Vidyalayam (19-20 Agustus).<sup>54</sup>

Di Kamboja, sekitar 80 tentara AS ditugaskan dalam Operasi Pacific Angel (PACANGEL) 2016, operasi bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh AS Pacific Air Forces untuk mempromosikan interoperabilitas antara militer regional dan militer multilateral dan organisasi sipil di Indo Asia-Pasifik. PACANGEL melibatkan penyediaan layanan kesehatan termasuk gigi, optometri, pediatri, dan terapi fisik - program teknik sipil, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, serta pertukaran subject matter expert exchange (SMEE) sejak tahun 2008 dirancang sebagai operasi bersamaan dengan Royal Thai Air Force dan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja, dengan sebagian besar terjadi di Kampung Chhang dan Kampong Cham di luar ibukota Kamboja Phnom Penh.<sup>55</sup>

Salah satu misi kemanusiaan oleh pemerintah Obama adalah dengan menyingkirkan pasukan militer sebagai bantuan kemanusiaan di wilayah Filipina Selatan yang mengalami bencana Topan Bopha pada Desember 2002. Amerika mengirim bantuan *Southern Philippines Humanitarian Assistance for Typhoon Bopha* pada 17 Desember 2012. AS menyediakan menyediakan 24 pesawat

---

<sup>54</sup> “*Operation Pacific Angel Concludes in Sri Lanka*” dalam <http://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/923576/operation-pacific-angel-concludes-in-sri-lanka/> diakses pada 2 Desember 2016.

<sup>55</sup> “*US, Cambodia Militaries Kick off Pacific Angel 2016*” dalam <http://thediplomat.com/2016/06/us-cambodia-militaries-kick-off-pacific-angel-2016/> diakses pada 2 Desember 2016.

terbang untuk memberikan 756.800 pon bahan bantuan di daerah yang mengalami bencana di wilayah Filipina Selatan.<sup>56</sup> Selanjutnya, pada 9 November 2013, dilakukan operasi bantuan “*Philippines Humanitarian Assistance for Typhoon Haiyan*”. AS mengerahkan kapal induk USS George Washington (CVN 73) dan kapal Angkatan Laut AS lainnya yang membawa 5.000 pasukan dan lebih dari 80 pesawat. Selain itu AS juga mengerahkan kapal penjelajah USS Antietam (CG 54) dan USS Cowpens (CG 63), perusak USS Mustin (DDG 89) dan USS Lassen (DDG 82) dan kapal pasukan USNS Charles Drew (T-ESB 10) dan Carrier Air Wing Five (CVW 5) termasuk Golden Falcons untuk pengerahan bantuan bencana serta pada tanggal 18 Desember 2013, DOD mengarahkan dua USC 130 pesawat untuk mengevakuasi 120 personil dari kedutaan di Juba, ibukota Selatan Sudan, ke Nairobi, Kenya.<sup>57</sup>

Selain itu, Obama juga mengikuti beberapa bentuk kerjasama atau perundingan dengan negara-negara lain dalam menghadapi kasus terorisme. Negara-negara Islam di Asia dan Timur Tengah memiliki peranan penting sebagai objek PLN AS. Nilai penting ini menyangkut perluasan pengaruh, hingga kepentingan perekonomian, misalnya target penjualan senjata, mitra kerjasama, pangsa pasar dan lainnya.<sup>58</sup> Obama mencoba memperbaiki kembali hubungan dengan Afghanistan. Terhadap Irak, Obama juga membuka jalur perundingan, negosiasi pertemuan (*agenda setting*) untuk permasalahan negara AS dan Irak. AS

---

<sup>56</sup> Barbara Salazar Torreon, *Instance of Use of United States Armed Force Abroad 1798 – 2016*, 2016, dalam <https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42738.pdf> diakses pada 2 Desember 2016.

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Opcit Aprylia Nur Amrina, h.86

dan Irak juga melakukan kerjasama *Joint Coordinating Comitte* (JCC) tentang energi.<sup>59</sup>

Dalam aspek ekonomi, Obama melakukan berbagai kerjasama untuk meningkatkan perekonomian AS. Obama mengikut sertakan pakta-pakta perjanjian melawan terorisme melalui beberapa kerjasama dalam rangka memerangi terorisme global melalui Asia Pasific Economi (APEC), ASEAN Regional Forum (ARF), Pasific Islands Forum (PIF) dengan menyelipkan kepentingan nasional AS. Dengan demikian politik luar negeri AS di beberapa kawasan juga ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional seperti stabilitas keamanan regional dari aksi-aksi terorisme, kepentingan ekonomi dan pengaruh demokrasi.<sup>60</sup>

Obama mendukung penarikan mundur pasukan AS secara bertahap dalam tempo 16 bulan sejak ia akan memulai jabatannya. Obama juga menentang penarikan mundur secara total dan mendukung upaya reposisi kekuatan militer AS di Irak, yaitu dengan menarik pasukan dari daerah operasi militer menuju ke posisi pelatihan dan logistik, dengan catatan, ketika pasukan Irak sudah mampu mengalahkan kelompok milisi perlawanan. Pada awal tahun pemerintahannya, Obama masih membutuhkan keberadaan kekuatan militer di sana untuk mendukung pelaksanaan kebijakannya di Timur Tengah, yang memungkinkan adanya konfrontasi militer di Iran, Syria, dan Lebanon Selatan. Obama juga semakin menekankan bahwa sebagian besar kekuatan militer AS harus tetap siaga

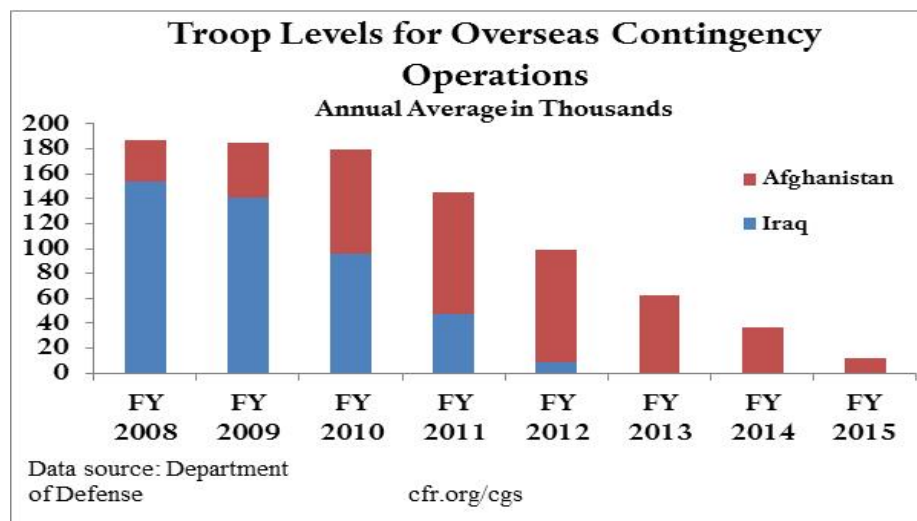
---

<sup>59</sup> Ibid, h.107-109

<sup>60</sup> Ibid, h.100

di tempat strategis seperti di di Irak.<sup>61</sup> Jumlah tentara AS di Irak terus berkurang sejak dia memerintah Januari 2009. Tanggal 19 Agustus 2010, brigade pasukan tempur AS yang terakhir meninggalkan Irak, namun sekitar 50.000 personil masih tetap di sana untuk mempersiapkan proses peralihan keamanan.<sup>62</sup> Selain itu, Obama mengumumkan rencananya untuk menarik hampir semua pasukan AS dari Afghanistan pada akhir 2016, ketika masa jabatan kedua hampir berakhir.<sup>63</sup> Berikut gambaran jumlah pasukan AS di Afghanistan dan Irak dari tahun 2008 sampai 2015.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Tentara Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak**  
**Tahun 2008 – 2015.**



Sumber : <http://www.cfr.org/defense-budget/trends-us-military-spending/p28855> diakses pada 29 November 2016.

<sup>61</sup> <https://m.hizbut-tahrir.or.id/2008/12/01/barack-obama-harapan-semu/> diakses pada 30 November 2016.

<sup>62</sup> "Perang Irak dalam Angka" dalam [http://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2013/02/130216\\_irak\\_statistik](http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/02/130216_irak_statistik) diakses pada 3 November 2106.

<sup>63</sup> "A timeline of U.S. troop levels in Afghanistan since 2001" dalam <http://www.militarytimes.com/story/military/2016/07/06/timeline-us-troop-levels-afghanistan-since-2001/86755782/> diakses pada 4 November 2016.

Pada tahun anggaran (TA) 2008, terdapat 154.000 tentara di Irak dan 33.000 tentara di Afghanistan. TA 2015 permintaan adalah untuk rata-rata 11.661 tentara berada di Afghanistan selama tahun ini. Jumlah pasukan di Afghanistan diatur untuk mencapai 9.800 pada akhir Desember 2014.<sup>64</sup> Pada pemerintahan Obama, jumlah pasukan yang berada di Afghanistan dan Irak secara bertahap berkurang sejak tahun 2008 hingga 2015.

Untuk memerangi terorisme, Presiden Obama juga memanfaatkan koalisi internasional. Koalisi internasional adalah upaya untuk merangkul kembali negara-negara yang semula di era Bush ditinggalkan, untuk meyakinkan negara-negara tersebut bahwa keberadaan mereka merupakan hal yang penting untuk AS.

Pada masa kepemimpinan Obama, Obama cenderung menggunakan konsep *smart diplomacy* dalam kebijakan luar negeri yang ia buat terhadap terorisme. Istilah *smart power* yakni *the ability to combine soft and hard power into a winning strategy*, kemampuan untuk mengkombinasikan *soft* dan *hard power* dalam memenangkan suatu strategi melalui cara-cara yang mengutamakan dialog, kerjasama negara bersangkutan dengan tetap menyelipkan kepentingan nasional negaranya. Strategi yang diambil berdasarkan prinsip *smart power* adalah sebuah strategi yang menekankan pentingnya militer yang kuat, pentingnya aliansi, kemitraan dan insitusional diberbagai level untuk mendukung pengaruh dan legitimasi suatu aktor.<sup>65</sup> Hal ini ditujukan dengan besarnya sumber anggaran yang dialokasikan untuk penarikan pasukan militer sejak tahun 2009 hingga akhir periode kepengurusan Obama, melakukan pendekatan dengan negara-negara

---

<sup>64</sup> <http://www.cfr.org/defense-budget/trends-us-military-spending/p28855> diakses pada 29 November 2016.

<sup>65</sup> Opcit Aprylia Nur Amrina, h.16



muslim, *agenda setting* di Irak serta penguatan kerjasama ekonomi internasional dan kekuatan aliansi koalisi militer internasional. Anggaran yang sangat besar tidak hanya digunakan untuk melakukan operasi militer akan tetapi tentara di *repackage*, dikemas ulang dengan melekatkan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan dalam aktivitas tentara (*humanization military power*) untuk membawa misi pencitraan yang baik tentang Amerika. Sedangkan anggaran dana militer di era Bush digunakan sebagaimana mestinya fungsi militer yaitu untuk memerangi teroris dengan penggunaan aksi-aksi senjata militer, kekerasan, bumi hanguskan wilayah dinegara-negara yang dianggap sebagai pelindung teroris dan identik dengan unilateralism.

Peristiwa penyerangan terorisme pada 11 September 2001 merupakan pukulan terberat bagi AS sebagai negara adidaya. Munculnya berbagai gerakan terorisme internasional seperti Al-Qaeda dan ISIL, menjadikan AS melakukan berbagai upaya dalam memerangi terorisme internasional. *War on terrorism* digunakan sebagai strategi kebijakan AS dalam memerangi gerakan terorisme internasional. *Global war on terror* baik era Bush maupun Obama memiliki kepentingan yang sama yaitu mewujudkan tujuan nasional AS. Akan tetapi operasionalisasi kebijakan *war on terrorism* oleh Presiden Bush dan Obama terlihat sangat berbeda. Pada era Presiden Bush karakteristik *war on terrorism* adalah penggunaan *hard power* dalam bentuk kekuatan militer, sanksi hukum atau embargo, sanksi ekonomi dan *reward*, ancaman, perlindungan hingga serangan menjadi instrument utama dalam politik luar negerinya, namun arah kebijakan

*war on terrorism* era Obama sedikit berubah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tanpa menghilangkan penggunaan kekuatan militer, melakukan humanisasi pada kekuatan militer, ditambah mengedepankan penggunaan kekuatan aliansi militer, kekuatan ekonomi serta dialog perdamaian yang dikenal dengan istilah *smart diplomacy*.